

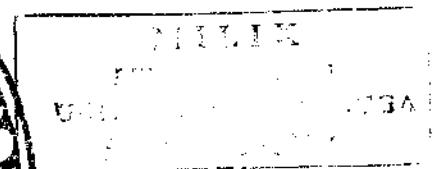
SKRIPSI

DILIYA ANDRIYANI

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA MELALUI JAMSOSTEK DIKAITKAN DENGAN ETOS KERJA DI P.T. JAVA PACIFIC CONTAINER FACTORY



KK
No. 122/1998
A. H.
16



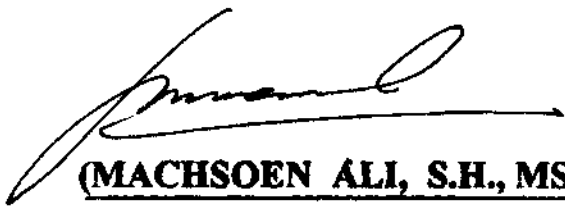
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1998**

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA
MELALUI JAMSOSTEK DIKAITKAN DENGAN ETOS KERJA
DI P.T. JAVA PACIFIC CONTAINER FACTORY**

SKRIPSI

**DIAJUKAN GUNA MELENGKAPI TUGAS-TUGAS DAN MEMENUHI
SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR
SARJANA HUKUM**

PEMBIMBING



**(MACHSOEN ALI, S.H., MS)
NIP. 130355366**

PENYUSUN,



**(DILIYA ANDRIYANI)
NIM. 039413976**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1998**

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Tenaga kerja adalah pihak yang lemah secara sosial-ekonomi bila dibandingkan dengan kedudukan dan kekuasaan yang dimiliki pengusaha. Tidak itu saja, dalam melakukan pekerjaannya tenaga kerja masih harus berhadapan dengan kesewenang-wenangan pengusaha dan berbagai kemungkinan resiko yang timbul. Pemerintah memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan kepada tenaga kerja dan keluarganya dengan menetapkan segala bentuk peraturan perundang-undangan dalam bidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang berasaskan usaha bersama, kekeluargaan dan gotong-royong. Dimana perlindungan Jamsostek berbentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian/seluruh penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Guna menjamin terwujudnya pemerataan kesempatan memperoleh perlindungan dari Jamsostek, maka program ini harus bersifat wajib.

PT JPCF berdiri dan mulai beroperasi setelah dikeluarkannya UU no. 3//1992 beserta peraturan pelaksanaannya, seharusnya pihak pengusaha dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab melaksanakan aturan tersebut dengan mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jamsostek. Namun dalam

kurun waktu tertentu, pengusaha tidak mendaftarkan perusahaan dan tenaga kerjanya dalam program Jamsostek. Hal ini memicu berbagai keluhan dan unjuk rasa sebagai akibat dari kekhawatiran dan ketidakpuasan tenaga kerja karena tidak mendapatkan perlindungan dan merasa tidak diperhatikan kesejahteraannya, mengingat kegiatan pekerjaan berupa pengolahan benda-benda logam sangat beresiko. Pengusaha mulai menganggap masalah ini serius ketika mulai dirasakan tidak adanya ketenangan bekerja sehingga etos kerja dan produktivitasnya berkurang akibat tenaga kerjanya mogok kerja. Dalam perkembangannya, pengusaha mendaftarkan perusahaan dan tenaga kerja beserta keluarganya dalam kepesertaan program Jamsostek.

Namun demikian, pengusaha tidak konsisten menjalankan semua aturan hukum yang berlaku, beberapa hal dapat disebut sebagai penyimpangan yang layak untuk mendapatkan sanksi. Tenaga kerja karian lepas (TKHL) tidak diikutsertakan dalam program jaminan ini sehingga bila terjadi resiko-resiko kerja akibat peristiwa tidak pasti , maka tidak jelas siapa yang akan menanggung . Tenaga Kerja Asing (TKA) tidak diikutsertakan dalam Program Jamsostek walau kepesertaanya wajib.

- b. Peraturan perundang-undangan tentang Jamsostek merupakan sarana yang tepat untuk mengupayakan perlindungan hukum bagi tenaga kerja, asalkan penerapan peraturan-peraturan tersebut harus seiring dengan kesadaran dan tanggung jawab pengusaha, tenaga kerja, dan PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara. Mekanisme pengawasan dan ketegasan aparat penegak hukum dalam mensinyalir terjadinya pelanggaran yang dapat dijatuhi sanksi juga

berperan agar program ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak. Ini tidak terjadi pada kepesertaan PT JPCF dalam program Jamsostek, perusahaan ini tidak mendapatkan teguran bahkan sanksi atas tidak terlaksananya Jamsostek diperusahaan sesuai aturan hukum yang ada. Selain perlindungan dari resiko pada hakekatnya program ini memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti dari sebagian/seluruh penghasilan yang hilang . Dari segi jasmaniah dan batiniah, Jamsostek mampu dirasakan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan.

Perlindungan tenaga kerja dengan adanya Jamsostek berpengaruh langsung pada rasa aman dan ketenangan bekerja. Keadaan ini akan memberikan dampak yang baik bagi kondisi etos kerja di perusahaan menuju kearah peningkatan produktivitas tenaga kerja dan efisiensi kerja. Peserta Jamsostek di PT JPCF telah merasakan manfaat dan dampak dari kepesertaannya itu, seandainya pelaksanaan Jamsostek di PT JPCF lebih maksimal maka dampak yang dirasakan tenaga kerja juga akan maksimal.

2. Saran

- a. Perlu ditingkatkan kesadaran hukum dan rasa tanggung jawab pengusaha untuk melaksanakan kewajibannya sebagai akibat diberlakukannya aturan hukum mengenai Jamsostek sehingga dapat mewujudkan hubungan yang harmonis antara tenaga kerja dan pengusaha yang berasal dari kepentingan yang berbeda dengan cara pemenuhan hak tenaga kerja atas jaminan sosial

tenaga kerja., terutama bagi tenaga kerja harian lepas dan tenaga kerja asing sehingga tidak ada diskriminasi .

- b. Peningkatan terhadap peran pemerintah (terutama dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum) dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja melalui kebijaksanaan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan memaksimalkan peran pengawasan oleh pengusaha dan tenaga kerja

Sudah waktunya peraturan mengenai Jamsostek dilaksanakan secara law enforcement, yaitu terhadap pelanggar dikenai sanksi hukum yang telah dikemas dalam peraturan tersebut. Sehingga ketenangan bekerja mampu meningkatkan etos kerja dan produktivitas..